

**RELEVANSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM**
(Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Digital di MTs Masyariqul Anwar Caringin)

Siti Maryam

STIT Islamic Village
stmaryam6762@gmail.com

Aat Royhatudin

STAI Syekh Manshur Pandeglang
royhatudin@staisman.ac.id

Siti Jubaedah

STAI Syekh Manshur Pandeglang
stjubaedah96@gmail.com

Abstract

Islamic education with digital-based *Kitab Kuning* learning taught in madrasa, learning that integrates religious knowledge with technological science, as a rebuttal to the dualism assumption contained in the national education system law. The aim of the research is to explain that digital-based learning of the *Kitab Kuning* is able to understand religion as a scientific discipline in an integrative and comprehensive manner, so that students at Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Caringin not only increase cognitive intelligence but also psychomotor intelligence. The results of this study found that students with digital-based religious learning were able to comprehend religion comprehensively so that it not only increased individual piety but social piety in accessing information in accordance with the demands of the times and the needs of society.

Keywords: *National Education Policy, Islamic Education, Kitab Kuning Learning.*

Abstrak

Pendidikan Islam dengan pembelajaran kitab kuning berbasis digital yang diajarkan di madrasah, pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama dengan sains teknologi, sebagai bantahan atas asumsi dualisme yang tertuang dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional. Tujuan dari penelitian untuk menjelaskan bahwa pembelajaran kitab kuning berbasis digital mampu memahami agama sebagai disiplin ilmu secara integratif dan komprehensif, sehingga bagi peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Caringin bukan hanya meningkatkan kecerdasan kognitif melainkan kecerdasan psikomotorik. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peserta didik dengan pembelajaran agama berbasis digital mampu memahami agama secara komprehensif sehingga bukan hanya meningkatkan kesalehan individu namun kesalehan sosial dalam mengakses informasi sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Katakunci : *Kebijakan Pendidikan Nasional, Pendidikan Islam, Pembelajaran Kitab Kuning.*

Pendahuluan

Dikotomi pendidikan, dari tahun ke tahun menjadi diskursus yang semakin hangat, yakni adanya pemisahan yang mencolok antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan yang dikotomis telah gagal memproduksi manusia berkepribadian saleh, namun mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Hal ini kemudian merambah kepada pendidikan yang sekular materialistik yang bisa melahirkan pandai dan menguasai sains-teknologi namun gagal membentuk kepribadian jauh dari peradaban Islam.”¹

Dalam wilayah peradaban yang dikembangkan dalam konteks pendidikan Islam seharusnya tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Islam dengan pendidikan memiliki nilai universal dan keilmuan yang integratif, karena dalam konsep pendidikan Islam, meliputi pendidikan keagamaan, sains dan

teknologi, karena bersumber utama pada wahyu Allah SWT. Pada prinsipnya pendidikan Islam bukan hanya sekedar mengajarkan ajaran hal yang prinsipil dengan *syariah* atau agama saja, tetapi ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hal yang *syariati* dengan pendekatan *maqasidusyari'ah*.

Yang dimaksud *maqasid* bukan sebagai filosofi hukum Islam tetapi sebagai pendekatan untuk memahami dan mengamalkan Islam yang mendefinisikan identitas dan menginformasikan kebijakan yang berpihak kepada orientasi Islam.² Pendekatan ini dimungkinkan untuk mempertahankan legitimasi Islam sambil berkembang yang berorientasi pada ideologi menjadi yang berorientasi pada kebijakan dan merespon kebutuhan masyarakat terutama pendidikan. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pada dasarnya Pendidikan Islam berbasis pesantren mampu diorientasikan dikontekstualisasikan pada pendidikan

¹ Hasbullah Hadi, Didin Hafidhuddin, Adian Husaini, Endin Mujahidin, Kebijakan Pendidikan Nasional terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler, MIQOT, Vol. XL No.2 Juli-Desember 2016, 390-409

² Halim Rane, The Relevance of A Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions, Journal Of Law & Religion, Vol. XXVIII, 2013, 489-520

nasional dan agama,³ yakni mencerdaskan masyarakat dan mengembangkan potensi secara keseluruhan yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi nyata bahwa akhlak mulia dengan ilmu dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, menjadi pribadi yang mandiri dan kuat serta bertanggung jawab untuk masyarakat dan bangsa dan agama.⁴ Inilah kemudian terejawantahkan pada perumusan Undang-undang.

Tujuan yang telah dirumuskan dalam UU tidak selamanya berjalan dengan mulus, yang ternyata dalam pelaksanaannya mengalami kendala, sehingga tidak memuaskan antara output pendidikan dan tujuannya, hal ini yang menjadi dasar bahwa pendidikan tidak selaras dengan kebijakan. Kondisi ini tercermin dari beberapa kasus yang menyebabkan lemahnya kepercayaan masyarakat, seperti korupsi, pelecehan seksual, pelecehan dalam keluarga dan tindak pidana lainnya.⁵ Kasus demikian mengindikasikan bahwa tujuan Pendidikan Islam belum tercapai dengan optimal.

Padahal berbuat yang demikian bukan karena persoalan tidak memahami agama Islam, namun kasus di kalangan akademisi Barat, ada departemen Pedagogi Agama Islam yang disponsori negara di universitas-universitas besar benua Eropa. Tujuannya tidak lebih bersifat politis, yang mencerminkan upaya pembuat kebijakan untuk mengatasi munculnya ekstremisme agama.⁶ Pedagogi yang dimaksud merupakan proses belajar mengajar prinsip yang bersumber dari Islam sebagai bahan penyelidikan yang hidup dalam bidang pendidikan Islam yang sedang berkembang di dunia internasional.⁷ Pedagogi itu sekaligus mengkritik kebijakan bersifat politis yang tujuannya adalah mampu mengkanter setiap persoalan menyangkut pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat adanya pendidikan Islam berbasis pesantren mampu menghadirkan pedagogi seiring dengan nilai-nilai Islam, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

³ Aat Royhatudin, Penguatan nilai-nilai pendidikan islam di sekolah dasar MALNU Pusat Menes, Jurnal Pendidikan Agama Islam 15 (2), 184-198

⁴ Tim penyusun, *UU RI No. 20 Thn. 2003*, (Jakarta: Grafika, 2007), 5

⁵ Muchtarom, Islamic Education In The Context Of Indonesia National Education, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. XXVIII No. 2 2013, 323-338

⁶ Abdullah Sahin, Special Issue "Islamic Education in Contemporary World: Traditions, Rearticulations & Transformation", Religion, 9 (11), 2018.

⁷ Claire Alkoutl, Pedagogies in Becoming Muslim: Contemporary Insights from Islamic Traditions on Teaching, Learning, and Developing, Religions, 2018,9, 367, 1-18

persoalan pendidikan Islam,⁸ relevansinya dengan kebijakan Pendidikan Nasional, menganalisisnya dan memberikan solusi secara teoritis, metodologis, dan praktis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mengedepankan analisis studi lapangan (*field reseach*) terkait implementasi Pendidikan Islam dengan eksistensi kebijakan pendidikan Nasional di Indonesia.

Kebijakan Pendidikan Nasional dan Posisi Pendidikan Islam

Setiap kegiatan yang diimplementasikan oleh lembaga pastinya berdasarkan pada kebijakan. Kebijakan melahirkan regulasi yang berlandaskan pada keuntungan bersama. Kebijakan harus selalu berorientasi pada masalah dan berorientasi pada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan merupakan ketentuan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dilakukan secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan pemerintah

merupakan pemegang kekuasaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis.⁹

Oleh karena itu, dalam menjalankan sistem pemerintahan ini harus didukung oleh tatanan kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya keselarasan antara kemauan rakyat dan kebijakan yang dikeluarkan. Ide kebijakan pertama kali dikemukakan oleh John Dewey dalam memperhatikan sifat eksperimen dalam mengukur kebijakan. Munculnya kebijakan sebagian besar disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang akan dilaksanakan.¹⁰ Carl J. Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino mengartikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan/ kegiatan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang terdapat hambatan (kesulitan) dan peluang untuk implementasi kebijakan yang diusulkan.¹¹ untuk mencapai tujuan tertentu. Termasuk kebijakan pendidikan nasional yang diintruksikan

⁸ Desyi Rosita, Aat Royhatudin, Budiana, TRADITIONAL PESANTREN CURRICULUM AND LEARNING CULTURE AS TAFATUQH FIDIN IN RUDHOTUL ULUM ISLAMIC BOARDING SCHOOL, Cakrawala Pedagogik, Volume 5 Nomor 1 April 2021, 39-52

⁹ Haedar, Policy Implementation: What, Why and How. Journal of Public Administration, Vol. 1 No. 1, 2010, 1-11

¹⁰ Wasitohadi, Hakekat Pendidikan dalam Perspektif John Dewey, Tinjauan Teoritis, Satya Widya, Vol. 30, No.1. Juni 2014, 49-61

¹¹ Leo Agustino, *Basics of Public Policy*, (Bandung : Alfabeta: 2008), 56

pemerintah dan negara memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga.

Dalam mengoperasikan pendidikan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memosisikan pendidikan agama hanya persoalan hak, bukan pada urusan kewajiban bagi peserta didik, karena dalam pasal 12 Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”¹² hal ini menjadi bias kepada pendidikan tradisional dan biasanya ini menjadi sasaran kebijakan yang cenderung tidak memihak kepada masyarakat, sekalipun menurut John Dewey, pola pendidikan tradisional cenderung melupakan kondisi subyektif/internal subyek peserta didik, sedangkan progresivisme

cenderung melupakan kondisi obyektif/eksternal subjek didik. Akibatnya, pada keduanya pendidikan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh berbasis pengalaman subyek peserta didik dalam konteks social budaya atau kondisi obyektif masyarakatnya.¹³

Namun tidak demikian halnya di lapangan berdasarkan data empirik, kebijakan pendidikan nasional yang diimplementasikan di madrasah, khususnya Masyariqul Anwar Caringin, sebagai lembaga pendidikan Islam dengan memberikan pengalaman dan pengamalan peserta didik disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat, bahwa peserta didik bukan hanya cerdas dalam kognitif melainkan cerdas dalam kepribadian dan karakter atau akhlak. Pendidikan Islam dengan pembelajaran pesantren berbasis digital yang harus dijadikan warisan permanen dari waliyullah Syekh Asnawi, yakni pembelajaran pesantren, dengan mengajarkan sepertiga kitab kuning kepada peserta didik, sebagai pengalaman subyek peserta didik dalam memahami agama atau disiplin ilmu secara integratif dan komprehensif.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

¹³ John Dewey, *Experience and Education*, (Bandung:Teraju, 2004), 76

Sejatinya disiplin ilmu (pengetahuan) mencakup secara komprehensif baik pengetahuan agama maupun umum, pemikiran Islam tradisional cenderung mengidentifikasi secara totalitas bahwa pengetahuan itu sebagai pengetahuan agama. Tipologi pengetahuan dalam Islam membagi seluruh pengetahuan manusia menjadi dua kategori yang mencakup semua, *al-'ulūm al-'aqlīyah* (pengetahuan rasional / argumentatif) dan *'al-ulum al-naqlīyah* (pengetahuan melalui transmisi). Pembagian ini mengkonseptualisasikan dasar-dasar epistemologi Islam dan membentuk tatanan pendidikan dalam Islam,¹⁴ meskipun iklim sosial dan politik dan budaya lokal telah mempengaruhi perkembangan institusi pendidikan, khususnya kebijakan pendidikan nasional secara signifikan, bahwa madrasah sebagai produk akhir dari perkembangan Islam, bagaimanapun, ditantang oleh gelombang modernisasi dan dominasi nilai-nilai Barat di Indonesia.

Demikian hal tersebut sangat menuntut adanya pembelajaran yang bisa mengimbangi terkait dengan persoalan kebijakan pendidikan nasional terhadap implementasi pendidikan Islam dengan nilai

dan sikap yang dilaksanakan secara seimbang antara kecerdasan *Cognitive* (kognitif, pengetahuan dan kecerdasan), *Psychomotor* (psikomotor, ketrampilan dan karya), *Affective* (afektif, sikap, mental, emosi, perasaan),¹⁵ yang disertai pembelajaran pesantren dengan kitab kuningnya (Tafsir al Jalalain, Nahwu Sharaf, Ushul Fiqh, Nurul Yaqin, Tarikh Tasyri') yang diorientasikan kepada keimanan dan ketaqwaan, hal ini yang membedakan dengan madrasah pada umumnya, terus dilakukan di Madrasah Masyarikul Anwar Caringin, sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan Islam dan masyarakat sekitar oleh pendiri dan pengagas madrasah, dalam hal ini pemerintah, Kementrian Agama, mengakomodir sekaligus diidentifikasi sebagai modal pendidikan ideal yang didambakan oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Burawoy setelah dengan membaca permasalahan dalam konteks pembelajaran, yaitu *positioning* pembelajaran kitab kuning dengan ilmu

¹⁴ Hidayatulla Azra, *Islamic Education in Indonesia, Handbook of Islamic Education*, IHRE, volume 7, 2018, 763-780

¹⁵ Depag RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), 64.

sains di antara kekuatan-kekuatan yang melingkupinya.¹⁶ Menindaklanjuti teori Burawoy, dalam memetakan dengan menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar MTs Masyarikul Anwar Caringin di antaranya adalah pembelajaran kitab kuning. Pengumpulan data penelitian di lapangan meliputi dua langkah, yaitu *pertama*, wawancara mendalam. *Kedua*, pengamatan terlibat. Analisa dilakukan dengan tehnik prosesual, di mana peneliti mencoba menganalisis secara mengalir mengikuti tema, konteks dan ketersediaan data yang mendukung. Penulisan ini bermaksud melukiskan atau menggambarkan keadaan subyek penelitian berdasarkan data yang telah didapatkan.

Sifat data yang digali lebih mengarah pada konsep emik, yakni membaca makna berdasarkan ukuran sistem dan nilai pembelajaran (pesantren) yang sedang diteliti.¹⁷ Walaupun tidak dipungkiri dalam eksplanasi laporan ini penulis akui lebih bernuansa etik, mengingat dalam membaca kasus dalam konteks global. Analisis disini cenderung bercorak etik. Analisa dilakukan

dengan gaya prosesualisme yang menekankan pada aspek bagaimana seseorang atau orang-orang mengkonstruksi makna. Prosesualisme dimulai dari yang partikular dan melacak bentuk relasi yang melampaui waktu dan bentuk-bentuk variasi.

Pembahasan dan Diskusi

Ada dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkembangan madrasah di Indonesia. Pertama, pendidikan Islam di madrasah muncul sebagai respon atas kebijakan Pemerintah Belanda, dan kedua, karena gerakan reformasi Islam di Indonesia, cukup intensif karena bersentuhan dengan gerakan reformasi di Timur Tengah.¹⁸ Oleh karena itu, secara historis, dualistik pendidikan Indonesia Sistem tersebut dapat diturunkan dari sejarah Indonesia sebelumnya. Belandalah yang memperkenalkan dualisme dalam pendidikan dengan dua otoritas yang terlibat dalam mengontrol dan mengawasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam sejatinya, tetap berlangsung dan diajarkan sesuai dengan karakteristik pendidikan tradisionalnya menjadi ciri khas masyarakat

¹⁶ Burawoy, *Global Ethnography: Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World*, (California: California Press, 2000), 5

¹⁷ M. Sitorus, *Konsep Dasar Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2011), 14

¹⁸ Erna Nurkholida, *Islamic International School: Wilted Before Growing Critical Study on Madrasah Curriculum*, in *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIIS XIII)*, 230-231

Indonesia, khususnya kaum muslimin. Sementara sistem pendidikan Nasional terus berkembang dan melaju menjadi pusat pembelajaran dan dalam perkembangannya, sekalipun kebijakan pendidikan terkesan dualisme yang membawa orientasi wawasan masyarakat Indonesia terbelah sesuai dengan karakter masing-masing pendidikan yang ditempuhnya.¹⁹ Namun demikian, orientasi pendidikan Islam yang diajarkan di Madrasah Masyarikul Anwar (MMA) yang berlatar pendidikan pesantren, berlangsung dengan kekhasannya pendidikan berkebutuhan pada masyarakat, seiring dengan kebijakan pendidikan nasional, yang pada realitasnya secara politis lebih siap menangani masalah-masalah kenegaraan, karena pola pendidikannya sejak awal mempersiapkan mereka untuk menjadi tenaga-tenaga profesional di lingkungan pemerintah.

Madrasah dengan ciri khas pendidikan Islamnya, mulai populer pada awal abad ke-20 karena semangat pembaruan keislaman. Kelahirannya setelah pesantren dan sekolah, madrasah mengadopsi bagian dari pesantren dan sistem pendidikan sekolah. Dinamika perkembangan madrasah pada tahun 1975, kurikulum madrasah difokuskan pada

pembelajaran ilmu agama, tidak heran jika madrasah hanya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Madrasah didefinisikan dalam Surat Keputusan sebagai: “Institusi pendidikan yang menjadikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar dengan pengetahuan agama diajarkan.

Ada beberapa persoalan kebijakan pendidikan nasional dengan pendidikan Islam di MMA khususnya madrasah Tsanawiyah, keterkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.²⁰

Selain itu juga persoalan dualisme yang membenturkan posisi pendidikan Islam tidak kuat dan tidak berdaya saing (*market able*) di pasaran dunia global, sehingga posisi pendidikan Islam semestinya mencerna dan mengkritisi, kalau tidak demikian bisa merusak identitas dirinya. Karena globalisasi

¹⁹ M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: CV. Pedomani Ilmu Jaya, 2003), 48

²⁰ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

yang menekankan pada urusan duniawi, bisa menjelma menjadi peluang (*opportunity*), bisa pula menjadi tantangan (*threat*) terbesar. Posisi pendidikan Islam yang sejatinya yang harus dan tetap dipertahankan adalah sikap yang selektif, kritis, dan terbuka terhadap hadirnya global yang menjelma, bukan dengan sikap eksklusif, atau terseret arus globalisasi sehingga mengikis identitas pendidikan Islam itu sendiri. Sekalipun pada realitasnya pendidikan Islam saat ini sedang menghadapi persoalan mendasar, di antaranya praktek pendidikan yang terfokus pada kesalehan individual yang berakibat keteringgalan teknologi, yang berakhir dengan dikotomi ilmu dan masalah tradisi berpikir normatif-deduktif.²¹

Globalisasi tidak bisa dihindari, namun perlu disadari dan dipahami serta direspon secara cepat dan tepat. Seiring globalisasi telah banyak mengubah kehidupan masyarakat, dan globalisasi bukan cuma percepatan arus informasi secara ekstrim kemajuan teknologi komunikasi.²² Melainkan dunia sudah mengglobal, di atas terjalin secara luas, erat

dan dengan proses yang cepat. Hubungan yang ditandai dengan penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti batas antara bangsa dan Negara.²³ Hal ini mengakibatkan perkembangan pedagogi dan karakter siswa terganggu. Kepribadian dan karakter yang dihasilkan tidak sejalan dengan proses pendidikan Islam yakni membentuk manusia yang berpikir kritis dan berakhlak mulia, sadar bertanggungjawab sebagai khalifah di bumi.

Melihat permasalahan demikian kesalehan individu sangat dibutuhkan dengan mengimplementasikan pendidikan Islam secara lebih nyata mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada sekarang yang penuh dengan nilai tauhid harus mampu memposisikan manusia sebagai makhluk yang ditunjuk menjadadi khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab atas kelangsungan dunia. Pendidikan Islam bertransformasi kesalehan perlu dilakukan dengan lebih mengetahui bagaimana transformasi kesalehan individu menuju kesalehan sosial itu dapat terwujud yaitu dengan pembelajaran kitab kuning yang berbasis digital adalah keterbukaan dalam mengakses informasi tanpa mengikis identitas, hal ini yang menjadi peluang untuk

²¹ Abd. Rachman Assegaf, *Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 351.

²² Anthony Giddens, *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 16

²³ Muhtrom, *Reproduksi Ulama di Era-globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 45.

memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dengan pembelajaran kitab digital. Pendidikan Islam dengan pembelajaran kitab kuning berbasis digital ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar berselancar dengan dunia maya yang beraktivitas di lingkungan belajarnya, namun tanpa menghilangkan aktivitas belajar mereka sendiri. Dalam arti belajar dengan pemanfaatan akses internet adalah pembelajaran yang menyenangkan akan menjadikan suasana belajar yang efektif dan lebih hidup. Sekalipun realitas pendidikan Islam saat ini sedang menghadapi persoalan mendasar, di antaranya praktek pendidikan yang terfokus pada kesalehan individual yang berakibat ketertinggalan teknologi, yang berakhir dengan dikotomi ilmu dan masalah tradisi berpikir normatif-deduktif.²⁴

Pembelajaran pendidikan Islam dengan mengkaji kitab kuning berbasis digital karena tujuan dari kitab kuning adalah *littfaqquh fiddin* yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam yang termuat di kitab, lebih mengutamakan pengamalan daripada sekedar prestasi kognitif semata berupa hafalan-hafalan dan sebagainya. Oleh karenanya dibutuhkan

kesadaran dari diri para siswa menuntut ilmu dengan ilmu. Keuntungan lainnya adalah para siswa mampu mengakses internet dengan mudah dan efektif dalam membuka kitab baik di smart phone, ataupun di laptop dan desktop. Kebebasan sebagai aktualisasi diri bagi peserta didik supaya kreatif, bebas dalam arti positif itulah yang disuguhkan MTs Masyarikul Anwar kepada siswanya. Lebih bagus lagi sebagian siswa ada yang menuntut ilmu di pesantren masih dalam lingkungan madrasah, untuk mengkaji kitab kuning dengan sistem tradisional melalui wetonan dan sorogan, hal ini kemudian memberikan kekuatan pendidikan Islam berkembang dengan baik, menambah ilmu dan wawasan mereka di luar fasilitas madrasah. Keadaan yang demikian diharapkan aktivitas positif yang dari para siswa, dengan sendirinya menemukan dan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan cara mendiskusikan secara mendalam, yang kemudian diaplikasikan di masyarakat, individu yang saleh harus memahami peran agama Islam secara transformatif. Pemeluk agama memahami makna dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, dakwah tersebut dijabarkan dalam peran turunnya agama Islam yakni agama hadir didunia untuk mengubah masyarakat dari berbagai kegelapan kepada cahaya yang

²⁴ Abd. Rachman Assegaf, *Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 351.

terang benderang. Agama hadir untuk pembangunan *taghyir*, yakni agama dimulai dari perubahan individu secara berangsur-angsur disusul dengan perubahan sosial. Islam sebagai agama hadir untuk peningkatan kecerdasan intelektual dan spritual sekaligus hadir untuk menghapus ketimpangan struktur ekonomi dan sosial.

Pendidikan Islam, identik dengan normatif dan deduktif, teologis dan eksklusif, cita-cita Islam yang berkuat pada persoalan tauhid dan aqidah sebagai pemenuhan kebutuhan bersifat syariat, padahal Islam hadir dengan *maqosidusyariah* sehingga persoalan merosotnya moral dan akhlak siswa disebabkan antara lain akibat kurikulum pendidikan agama terlampau padat pada materi dan materi tersebut lebih mengedepankan aspek keimanan ketimbang membangun kesadaran keberagamaan yang utuh. Selain itu metodologi pendidikan agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan serta terbatasnya bahan-bahan keagamaan. Buku-buku paket pendidikan agama belum memadai untuk membangun kesadaran beragama, memberikan keterampilan fungsional keagamaan dan mendorong perilaku bermoral dan berakhlak mulia pada peserta didik.

Dengan implementasi pendidikan Islam, melalui pembelajaran kitab kuning sebagai representasi dari pendidikan agama untuk mengatasi persoalan moral, sedangkan pendidikan umum atau nasional hanya mengurus bagaimana menguasai perkembangan ilmu pengetahuan. Inilah masalah dikotomi keilmuan pun menjadi persoalan yang tidak pernah habisnya diperdebatkan dalam pendidikan Islam. Menurut Ahmad Barizi, terdapat asumsi bahwa pemetaan lebih jauh antara apa yang disebut dengan *revealed knowledge* (pengetahuan yang bersumber dari wahyu Tuhan) dan *scientific knowledge* (pengetahuan yang bersumber dan berasal dari analisa pikir manusia) seperti filsafat, ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), ilmu-ilmu humaniora (*humanities sciences*), ilmu-ilmu alam (*natural sciences*), dan ilmu-ilmu eksakta (*mathematic sciences*).²⁵ Islam sendiri tidak mengenal adanya dikotomi karena Islam memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an sebagai kitab suci Islam mengandung banyak keterangan-keterangan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Islam sangat menganjurkan umatnya menyelidiki rahasia alam tersebut melalui kegiatan ilmiah.

²⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format non Dikotomik*, (Yogyakarta: Gama Media, 2012), 15.

Padahal orientasi sains dan teknologi sesungguhnya merupakan instruksi utama al-Qur'an bagi terbentuknya cara berpikir kritis.²⁶ Tidak terlepas dari hal itu, maka manusia berperan penting dalam mengembangkan peradaban melalui proses pendidikan yang seutuhnya.

Memilih dan menentukan kurikulum pendidikan Islam harus bermuara pada strategi membangun kesadaran pada semua lapisan masyarakat. Selama ini kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Oleh karena itu, perhatian para guru, kepala madrasah, maupun praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama. Dalam kasus pendidikan di Indonesia misalnya, problem paling besar yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya bukan problem kurikulum meskipun bukan berarti kurikulum tidak menimbulkan problem. Namun, masalah kesadaran merupakan problem yang paling besar yaitu lemahnya kesadaran untuk berpartisipasi, kesadaran untuk sukses, kesadaran untuk meningkatkan SDM, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun kesadaran untuk berbuat yang terbaik.

²⁶ Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 32

Penutup

Implementasi pendidikan Islam tidak sekedar menjelaskan bagaimana agama diterjemahkan dengan bahasa keimanan dan ketakwaan, namun pendidikan Islam sebagai agama, mampu memahami secara mendalam dan komprehensif dengan kemampuan ilmu pengetahuan agama yang didasari pada wahyu Tuhan sekaligus ciptaannya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan dunia global. Hal inilah tujuan pendidikan Islam secara umum yang dijadikan visi misi pendidikan madrasah masyarikul Anwar Caringin dengan melakukan terus pembelajaran kitab kuning sebagai warisan permanen, sekaligus bukti konkrit dan nyata dalam membangun pendidikan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai kebijakan pendidikan Nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan.

Referensi

- Agustino, Leo. *Basics of Public Policy*. Bandung : Alfabeta: 2008.
- Alkouatl, Claire., *Pedagogies in Becoming Muslim: Contemporary Insights*

- from Islamic Traditions on Teaching, Learning, and Developing, Religions, 9, 367, 2018.
- Azra, Hidayatulla. Islamic Education in Indonesia, Handbook of Islamic Education, IHRE, volume 7, 2018.
- Barizi, Ahmad. *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Burawoy. *Global Ethnography: Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World*. California: California Press, 2000.
- Dewey, John. *Experience and Education*. Bandung: Teraju, 2004.
- Giddens, Anthony. *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Haedar., Policy Implementation: What, Why and How. Journal of Public Administration, Vol. 1 No. 1, 2010.
- Hasan, M. Ali dan Mukti Ali. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: CV. Pedomani Ilmu Jaya, 2003.
- Hasbullah Hadi, Didin Hafidhuddin, Adian Husaini, Endin Mujahidin, Kebijakan Pendidikan Nasional terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler, MIQOT, Vol. XL No.2 Juli-Desember 2016.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Menggagas Format non Dikotomik*. Yogyakarta: Gama Media, 2012.
- Muchtarom, Islamic Education In The Context Of Indonesia National Education, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. XXVIII No. 2 2013.
- Muhtrom. *Reproduksi Ulama di Era-globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nurkholida, Erna., Islamic International School: Wilted Before Growing Critical Study on Madrasah Curriculum, in Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIIS XIII).
- Rachman Assegaf, Abd. *Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahman, Afzalur. *al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. M. Arifin. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Rane, Halim., The Relevance of A Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions, Journal Of Law & Religion, Vol. XXVIII, 2013.
- RI, Depag. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003.
- Sahin, Abdullah. Special Issue "Islamic Education in Contemporary World: Traditions, Rearticulations & Transformation", Religion, 9 (11), 2018.
- Sitorus, M. *Konsep Dasar Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2011.
- Tim penyusun, UU RI No. 20 Thn. 2003. Jakarta: Grafika, 2007.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Wasitohadi., Hakekat Pendidikan dalam
Perspektif John Dewey,
Tinjauan Teoritis, Satya Widya,
Vol. 30, No.1. Juni 2014.